

ABSTRAKSI

Skripsi ini adalah penelitian tentang restrukturisasi birokrasi yang terjadi di Kabupaten Jombang, pasca penerapan PP No. 8/2003 yang berisi tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Daerah. Akibat penerapan PP tersebut, terjadi pemekaran di dalam struktur birokrasi di Kabupaten Jombang.

Maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana hasil dari restrukturisasi ini, berkaitan dengan perubahan-perubahan struktural yang ada beserta permasalahan-permasalahan kelembagaan yang kemudian muncul akibat perubahan struktur tersebut. Pemekaran struktur birokrasi berdampak pada tumpang tindihnya tugas dan fungsi masing-masing lembaga di Pemkab Jombang. Dari permasalahan kelembagaan itu memunculkan konflik kepentingan antar lembaga internal birokrasi di Pemkab Jombang.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, sedangkan teknik penelusuran data adalah kualitatif, dimana data diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber di kabupaten Jombang dan data-data sekunder untuk memperkuat hasil wawancara. Dari data-data yang diperoleh tersebut, penulis melakukan analisis berdasarkan konsep-konsep birokrasi Osborne dan Gaebler, David Beetham serta teori konflik Dahrendorf.

Dari konsep dan teori di atas, ditemukan berbagai permasalahan struktural setelah adanya pemekaran birokrasi di Kabupaten Jombang. Besarnya struktur birokrasi yang ada menyebabkan munculnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar lembaga pemerintahan. Keputusan Pemerintah daerah Jombang untuk tetap mempertahankan struktur yang ada saat ini menyebabkan tumpang tindih tugas dan fungsi di atas tetap berlangsung, hal ini menimbulkan konflik internal di dalam struktur birokrasi di Kabupaten Jombang.